

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Dikatakan tidak berpengaruh signifikan karena PAD yang masih rendah dengan melihat dari rata-rata PAD yang diperoleh tiap kabupaten di Jawa Timur ini hanya sebesar 9,4% dari total pendapatan daerah. Dengan adanya rata-rata PAD tiap daerah tersebut menunjukkan pendapatan daerah lainnya diperoleh dari pendapatan yang tidak berasal dari kekayaan daerah tetapi sebagian besar berasal dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan lain.lain.
2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang dilihat dari DAU tidak memiliki keterkaitan terhadap skor kinerja Pemda karena dalam penetapan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan sisi keuangan saja serta dalam penggunaan DAU sering tidak tepat dan terkesan tidak

transparan oleh pemerintah daerah, sehingga tingkat ketergantungan pada pusat tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

3. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Dikatakan tidak berpengaruh signifikan karena sering terjadinya belanja modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terjadi banyak kasus *mark up* terhadap belanja modal yang mengakibatkan kerugian dan juga penyelewengan dana, sehingga disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
4. Temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Semakin sedikit jumlah temuan audit BPK yang dilihat dari opini audit yang diberikan BPK maka semakin baik pula kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik pemda yang digambarkan melalui tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan temuan audit BPK. Variabel ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel temuan audit BPK yang diproksikan dengan opini audit yang dikeluarkan BPK. Dalam opini audit tersebut belum terlalu detail menjelaskan seberapa besar temuan audit suatu daerah. Opini audit hanya mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat.

5.3 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dan bukan hanya pada faktor keuangan saja tetapi non keuangan juga bisa menjadi salah satu alternatif.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang pengukurannya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I., 2014, *Audit Sektor Publik, Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2007, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro-Semarang.

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: *Simposium Nasional Akuntansi 15*, <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>

Nugroho, Renas Adi. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011), *Skripsi*, Universitas Diponegoro.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.

Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen), *Tesis*, Universitas Diponegoro.

Sedyaningsih, Peny dan Zaky, Achmad. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012).

Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Indonesia), *Skripsi*, Univesitas Diponegoro.

Suhardjanto, Djoko dan Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia), *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia), *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret.

Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi. Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta.

Ulum, I. MD., 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: UMM Press.

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Utomo, Kharis Prasetyo. 2015. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012).

Zuliarti, 2012, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus, *Skripsi*, Universitas Maria Kudus.